

TARIF BEA MASUK OPTIMAL BAGI PRODUK PERTANIAN INDONESIA

¹Dian Dwi Laksani, ²Rizky Eka Putri

¹Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, Badan Pengkajian dan

²Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan-RI
dian.laksani@kemendag.go.id

ABSTRAK

Setiap negara berhak menentukan besaran Tarif Bea Masuk (TBM) yang dikehendaki terhadap suatu produk atau komoditi. Kebijakan tarif bea masuk untuk produk pertanian adalah menerapkan nilai serendah mungkin apabila produk/komoditi yang bersangkutan tidak dapat diproduksi secara optimal di dalam negeri. Studi ini dilakukan untuk melihat pengaruh tarif bea masuk produk impor pertanian terhadap produksi atau penjualan dari produk pertanian di Indonesia serta menghitung besarnya tarif optimal untuk produk-produk pertanian Indonesia dengan menggunakan panel data OLS. Hasil estimasi memperlihatkan, jika pemerintah menaikkan tarif sebesar 1 persen, maka secara langsung petani akan menikmati peningkatan pendapatan sebesar Rp. 1,62 juta/hektar. Tarif juga memiliki pengaruh signifikan terhadap fluktuasi penjualan produk-produk pertanian sebesar 54.73 persen. Buah-buahan merupakan komoditas yang paling rentan terpengaruh oleh tarif, posisi kedua yaitu produk padi dan palawija serta posisi ketiga yaitu sayuran.

Kata kunci: Tarif, Produk Pertanian, Panel Data, Perdagangan Internasional

OPTIMAL TARIFF RATE FOR INDONESIA'S AGRICULTURAL PRODUCT

ABSTRACT

Every country or economy has a right to determine their tariff rate for each product or commodity. Tariff policy for agricultural product was aimed to establish at the lowest level possible only if the product could not be optimally produced domestically. This study was conducted to see the influence of import tariff rate for agricultural product, to the production or selling process of agricultural product in Indonesia, while also counting the optimum tariff rate for Indonesia's agricultural product through Ordinary Least Square Data Panel. The result show that, if Government was increasing the tariff by 1 percent, then farmers would directly benefited an increasing sales as Rp. 1,62 Million/ hectare. Tariff rate also has significant impact to the fluctuation of sales of agricultural product by 54,73%. Fruits is the most vulnerable commodity that will be influenced by tariff rate changes, followed by rice, and vegetables in the last.

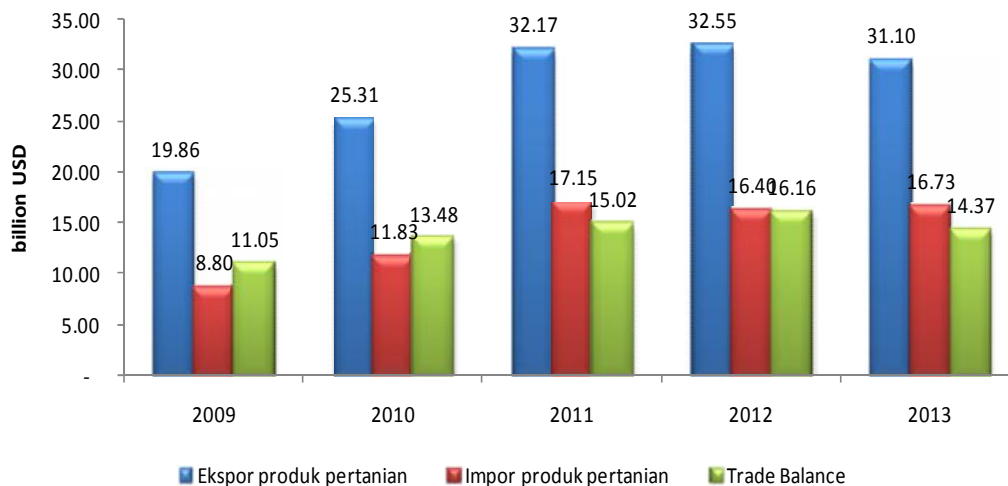
Key words: tariff, Agricultural Products, Data Panel, International Trade

PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris, pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik (2015) menyatakan bahwa sebesar 14,3% dari total Pendapatan Domestik Bruto di tahun 2104 datang dari sektor pertanian. Tetapi hingga saat ini, tingkat kesejahteraan petani juga belum

mengalami peningkatan dengan baik. Menurut berita yang dikeluarkan dalam harian Kompas, tingkat kesejahteraan petani Indonesia berdasarkan Nilai Tukar Petani (NTP) kian menurun sejak tahun 2012 sebesar 102,5% hingga menjadi 102% di tahun 2014 (Reinars & Sulaiman, 2015). NTP menunjukkan daya beli dari petani, yang saat ini semakin menurun seiring dengan melambungnya harga-harga barang kebutuhan pokok. Hal ini membuat produktivitas petani menurun dan juga berakibat pada turunnya stok. Akibatnya, terjadilah impor komoditi pertanian untuk menutupi kurangnya pasokan barang.

Hingga saat ini, ada beberapa hal yang mendasari mengapa pertanian masih dan akan menjadi bagian penting bagi ekonomi Indonesia. Pertama, besarnya potensi sumber daya alam Indonesia. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam yang berbeda. Kedua, pangsa ekspor produk pertanian masih cukup besar.



Sumber: *Trade Map* diolah, 2015

Gambar 1 Perdagangan Produk pertanian Indonesia ke Dunia

Gambar 1, ekspor produk pertanian Indonesia selama tahun 2009-2013 bernilai sebesar 3 kali nilai impor, yang mana hal ini merupakan pertanda baik bagi pertumbuhan ekonomi domestik. Negara tujuan ekspor tertinggi sebagaimana yang terlihat di Tabel 1 adalah India, disusul oleh RRT, Amerika Serikat, Belanda dan Malaysia. Komoditi utama dalam sektor pertanian yang menjadi unggulan Indonesia adalah karet dan produk karet, kelapa sawit dan turunan sawit, kakao dan kopi. Sementara komoditas pertanian yang diimpor oleh Indonesia didominasi oleh beras, gula, jagung, kedelai, cabe, dan bawang merah (Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian, 2014).

Tabel 1
Ekspor Sektor Pertanian ke Negara-negara di Dunia

No	Importir	Nilai : Miliar USD				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	India	3,68	4,70	5,64	5,29	4,89
2	RRT	2,22	2,80	3,65	4,17	3,22
3	USA	1,72	1,81	2,08	2,17	2,54
4	Belanda	1,34	1,65	1,99	2,18	1,90
5	Malaysia	1,89	2,99	3,60	2,88	1,84
6	Singapura	0,97	1,23	1,52	1,69	1,41
7	Jepang	0,84	0,96	1,18	1,18	1,15
8	Italia	0,54	0,65	0,75	0,77	0,98
9	Pakistan	0,23	0,20	0,43	0,85	0,96
10	Bangladesh	0,55	0,67	0,97	0,79	0,68
11	Mesir	0,39	0,49	0,94	0,56	0,66
12	Vietnam	0,35	0,52	0,58	0,66	0,63
13	Spainyol	0,30	0,36	0,52	0,37	0,60
14	Jerman	0,53	0,57	0,53	0,52	0,58
15	Filipina	0,23	0,39	0,52	0,58	0,56
	Sub Total	15,77	19,99	24,91	24,67	22,59
	Lainnya	4,08	5,32	7,26	7,89	8,51
	Total	19,86	25,,31	32,17	32,55	31,10

Sumber: *Trade Map* diolah, 2015

Tabel 2
Perbandingan Tarif Produk Pertanian Indonesia dengan Negara ASEAN 2012

Negara ASEAN	MFN applied (%)
Brunei Darrussalam	0,1
Kamboja	15,2
Indonesia	7,9
Lao PDR	0
Malaysia	11,2
Myanmar	8,5
Filipina	9,8
Singapura	1,4
Thailand	21,8
Vietnam	16,1

Sumber: *Trade Map* diolah, 2015

Alasan lain yang membuat pentingnya sektor pertanian di Indonesia adalah masih banyak penduduk di Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian dan bagaimana pertanian menjadi basis penggerak utama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, riset di bidang kebijakan pengembangan sektor pertanian masih sangat diperlukan dalam mengeksplorasi bidang ini lebih lanjut. Salah satu kebijakan pertanian yang menarik untuk dikaji adalah mengenai tarif bea masuk yang optimal bagi produk pertanian. Pengenaan tarif bea masuk berdampak langsung terhadap tingkat profitabilitas petani, yang pada

akhirnya berhubungan dengan tingkat kesejahteraan petani dan keseluruhan pekerja.

Tabel 2, rata-rata tarif produk pertanian di negara ASEAN adalah sebesar 9,2. Tarif Indonesia masih sebesar 7,9 dan berada dibawah nilai rata-rata. Besaran nilai tarif ini dapat berarti baik maupun buruk. Tingginya nilai tarif domestik berarti menekan tingkat kompetisi antar petani terutama dari negara lain. Sedangkan tarif yang rendah berarti mengurangi tingkat profitabilitas petani sekaligus memperbesar pintu persaingan antar petani. Oleh karena itulah besaran nilai tarif yang optimal diperlukan supaya kita dapat menghitung besaran tarif yang akan memberikan nilai tambah yang paling optimal bagi petani. Selain itu kita diharapkan dapat memproyeksikan berapa penambahan atau pengurangan pendapatan petani setiap perubahan nilai tarif. Studi yang mendasari penelitian ini adalah Izadmehr, et al (2014), yang menganalisis mengenai pengaruh tarif impor, tingkat inflasi dan nilai tukar terhadap pendapatan industri dengan menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS). Hasilnya adalah tarif impor memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan industri, sedangkan tingkat inflasi dan nilai tukar berpengaruh positif. Penurunan tarif impor akan menaikkan pendapatan industri dan sebaliknya.

Studi lainnya yaitu Pudjiastuti (2014), menganalisis perubahan neraca perdagangan Indonesia sebagai akibat penghapusan tarif impor gula, di dalam studinya dijelaskan bahwa variabel kebijakan perdagangan seperti tarif, relatif mudah dimanipulasi oleh pemerintah dan memiliki keuntungan politik. Selain itu, penerapan kebijakan tarif dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dan sebagai alat untuk melindungi sektor- sektor domestik. Dari hasil studinya bahwa penghapusan tarif impor gula di Indonesia berdampak pada output domestik, ekspor, impor dan neraca perdagangannya. Di sektor pertanian, output domestik dan impornya meningkat, ekspornya turun, tetapi neraca perdagangannya masih surplus. Ini berarti pemerintah Indonesia dapat dikatakan belum siap menghadapi liberalisasi gula, sehingga perlu melakukan negosiasi ulang perdagangan bebas dengan negara-negara anggota FTA dan menata perekonomian domestik terlebih dahulu. Tarif juga sering digunakan sebagai variabel untuk melihat hambatan perdagangan salah satunya studi dari Harrison e Hanson (1990) melihat hubungan tarif dengan pertumbuhan ekonomi, hasilnya yaitu adanya hubungan negatif antara tarif impor dan pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah tarif maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Ini dikarenakan industri mendapat bahan baku yang murah dengan mengimpor untuk kemudian memakainya menjadi barang jadi untuk di ekspor kembali.

METODE PENELITIAN

Tarif domestik memiliki hubungan yang erat dengan profit, terutama berkaitan dengan badan usaha yang memiliki orientasi ekspor atau impor. Baggs dan Brander (2006) dalam studinya menganalisis mengenai efek perubahan tarif karena melakukan Free Trade Agreement (FTA) terhadap pendapatan dalam hal ini pendapatan industri di Kanada dengan menggunakan Mode Regresi. Model yang digunakan yaitu:

$$\ln(\pi_{it}) = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta \tau_{it}^M + \alpha_2 \Delta \tau_{it}^E + \alpha_c C_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Dimana π merupakan pendapatan, T^m tarif impor, T^* tarif ekspor, C variabel pengontrol dan ε merupakan variabel error. Hasilnya yaitu ketika tarif domestik turun, maka profit juga akan ikut menurun. Hal ini disebabkan pintu impor terbuka lebih lebar karena turunnya tarif memicu adanya lonjakan impor. Begitu juga dengan penurunan tarif bea masuk di luar negeri diasosiasikan dengan kenaikan profit terutama untuk badan usaha dengan orientasi ekspor.

Salah satu tujuan dasar yang ingin dicapai dari adanya kerjasama perdagangan bebas antar negara (FTA) adalah pengurangan tarif bea masuk. tarif akan bertindak layaknya biaya tambahan atau pajak yang harus ditanggung dalam impor barang. Sehingga, penurunan tarif suatu negara dapat juga dilihat sebagai pengurangan biaya bagi barang impor yang masuk di negara tersebut. Penurunan tarif, selain menjadi insentif bagi importir juga menjadi dorongan bagi pengusaha di dalam negeri untuk dapat lebih bersaing dengan barang impor, yang pada akhirnya jikalau tidak pandai dalam bersaing dapat mengurangi profit mereka.

Studi ini menggunakan Panel Data *Ordinary Least Square* (OLS). Gujarati (1995) mengatakan bahwa model dapat dikatakan baik jika hasil regresi yang telah didapat kemudian diuji melalui uji ekonometrika dan uji statistik. Uji ekonometrika diantaranya uji autokorelasi, uji multikolinear dan uji heteroskedastisitas. Uji statistik digunakan pada model penduga melalui uji F, sedangkan parameter-parameter regresi dapat diuji melalui uji t, serta uji koefisien determinasi. Model estimasi panel data yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut :

$$SALES_{it} = b_0 + b_1TARIFF_{it} + b_2LINCPT_{it} + b_3LHARGA_{it} + e_{it} \quad (2)$$

Dimana s_0 adalah Intersep, s_1 , s_2 , s_3 adalah parameter masing-masing variabel yang akan diuji secara statistik dan ekonometrik, t adalah (1, , T) mulai tahun 1993 sampai dengan 2011, i adalah (1, , N) jenis produk pertanian yaitu padi palawija, buah-buahan, sayur-sayuran, **TARIFF** adalah tarif barang import (persentase), **LINCPT** adalah pendapatan perkapita (dalam bentuk natural logaritma), dan **LHARGA** adalah harga jual produk pertanian (dalam bentuk natural logaritma). Sedangkan variabel dependen yaitu penjualan maksimum yang dapat diperoleh oleh petani. Data ini merupakan data Produksi (ton/ha) dikalikan dengan harga (ton). Model estimasi panel digunakan untuk melihat pengaruh tarif bea masuk produk impor pertanian terhadap produksi atau penjualan dari produk pertanian di Indonesia. Selain melihat pengaruh dari tarif, studi ini juga menghitung besarnya tarif optimal untuk produk-produk pertanian Indonesia. Hasil dari estimasi panel data kemudian dihitung dengan menggunakan model optimal tarif untuk mendapatkan besaran tarif optimal dan batas tarif (*threshold*) yang masih bisa diterima oleh produk-produk pertanian Indonesia. Sumber data berasal dari data sekunder, yang meliputi data kuantitatif tahunan pada rentang waktu 1993-2011. Produk pertanian yang dimaksud dalam studi ini adalah padi dan palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), berupa dokumen atau arsip yang di dapat dari World Bank, Badan Pusat Statistik (BPS) serta data perdagangan yang diambil dari TradeMap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tarif Bea Masuk (TBM) adalah sejumlah nilai yang dibebankan terhadap adanya importasi suatu barang/komoditi kedalam suatu negara. Setiap Negara sebenarnya berhak menentukan besaran TBM yang dikehendaki terhadap suatu produk/komoditi, berbagai kerjasama bilateral membatasi besaran tersebut tidak lebih dari nilai tertinggi yang disepakati (*binding rate*). Untuk komoditas pertanian, besarnya TBM telah disepakati dengan instansi terkait serta pelaku usaha di bidang pertanian.

Kebijakan tarif bea masuk untuk produk pertanian adalah menerapkan nilai serendah mungkin apabila produk/komoditi yang bersangkutan tidak dapat diproduksi secara optimal di dalam negeri. Sebaliknya untuk produk pertanian yang perlu diperkuat daya saingnya di dalam negeri, dikenakan tariff bea masuk yang tinggi sesuai dengan aturan WTO. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan tarif optimal untuk produk pertanian.

Dalam studi ini dilakukan studi empiris untuk melihat pengaruh tarif bea masuk produk impor pertanian terhadap produksi atau penjualan dari produk pertanian di Indonesia. Selain melihat pengaruh dari tarif, studi ini juga menghitung besarnya tarif optimal untuk produk-produk pertanian Indonesia. Hasil estimasi model adalah sebagai berikut:

$$\text{SALES} = 1.620.000 \text{ TARIFF} + 80.200.000 \text{ LINCPT} + 26.100.000 \text{ LHARGA} \quad (2)$$

$$T\text{-ratio} \quad (4.11) \qquad (6.60) \qquad (7.96)$$

$$F(3) \quad : \quad 325,58$$

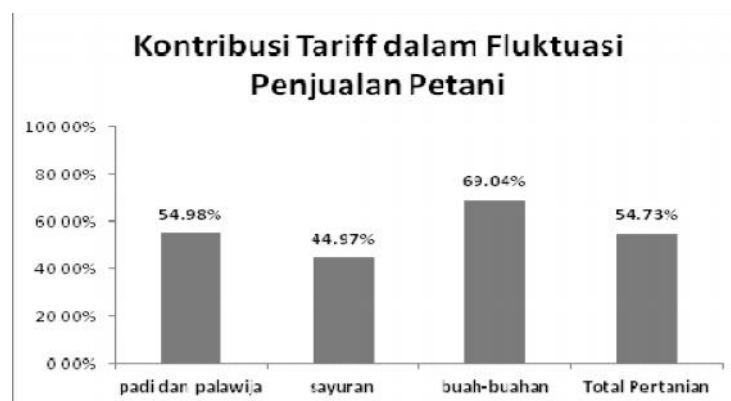
$$R^2 \quad : \quad 88,00\%$$

Berdasarkan hasil estimasi, terlihat bahwa tarif dapat mempengaruhi nilai penjualan (*sales*) petani. Penjualan petani di sektor pertanian akan terpengaruh oleh seberapa besar tarif yang diterapkan oleh pemerintah. Jika pemerintah meningkatkan level tarif, maka secara langsung penjualan produk pertanian di level petani juga akan meningkat. Dari hasil estimasi diperoleh koefisien estimasi sebesar 1,62 juta. Hal ini berarti jika pemerintah menaikkan tarif sebesar 1 persen, maka secara langsung akan menikmati peningkatan pendapatan sebesar Rp. 1,62 juta /hektar. Sebaliknya jika pemerintah hendak menurunkan tarif, petani juga akan langsung merasakan dampak berupa penurunan penjualan. Jika pemerintah menurunkan tarif sebesar 1 persen, maka petani juga akan mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp. 1,62 Juta /hektar.

Secara riil, kondisi ini bisa terjadi karena produk-produk pertanian domestik cenderung kurang kompetitif. Jika dihadapkan pada persaingan langsung dengan produk-produk asing, maka umumnya produk-produk domestik akan kalah bersaing. Semakin besar pemerintah menurunkan tarif berarti semakin besar pemerintah menghadapkan petani pada persaingan bebas. Semakin besar level tarif yang diturunkan berarti semakin besar petani akan kehilangan pendapatannya. Konsumen akan cenderung beralih pada produk-produk impor yang umumnya memiliki kualitas lebih baik, sehingga petani domestik akan kehilangan pembeli. Secara langsung, pengurangan pendapatan ini tentunya akan berimbas pada penurunan kesejahteraan petani.

Selain pengaruh dari kebijakan tarif, hasil estimasi menunjukkan bahwa penurunan penjualan petani juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia (LINCPT) dimana pengaruh penurunan pertumbuhan ekonomi terhadap penjualan ternyata lebih besar dibandingkan pengaruh yang diberikan tarif terhadap penjualan. Oleh karena itu penting bagi pemerintah agar menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menjaga level penjualan di tingkat petani. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, dinamis, dan terus tumbuh positif akan berkontribusi secara langsung pada kontinuitas penjualan produk-produk pertanian. Imbasnya, hal ini akan terasa dalam wujud peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Kontinuitas pertumbuhan ekonomi ini bisa dilakukan melalui sejumlah hal. Yang pertama, pemerintah harus menjaga level konsumsi masyarakat. Menurut Laporan Tahunan Bank Indonesia (2015), konsumsi masyarakat merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sekitar 56 persen dari total produk domestik bruto (PDB), sehingga kontinuitas pertumbuhannya akan berpengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum. Masyarakat harus didorong untuk melakukan konsumsi, terutama konsumsi produk-produk domestik milik petani. Kedua, pemerintah bisa mendorong lebih banyak investasi. Lebih banyak investasi, baik asing maupun domestik, berarti akan ada semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat. Ini berarti masyarakat akan memiliki semakin banyak pendapatan, yang berarti semakin besar peluangnya untuk membeli produk-produk pertanian domestik. Ketiga, pemerintah bisa menggunakan konsumsinya sendiri untuk mendorong pertumbuhan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan proyek-proyek strategis bidang pertanian seperti perbaikan infrastruktur dalam rangka meningkatkan produktivitas petani dan memperlancar arus barang. Keempat, pemerintah bisa menjaga surplus neraca perdagangan. Ekspor yang lebih besar dari impor akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan berpengaruh pada peningkatan penjualan petani. Hal ini bisa terjadi dengan mendorong ekspor produk-produk pertanian Indonesia ke luar negeri.



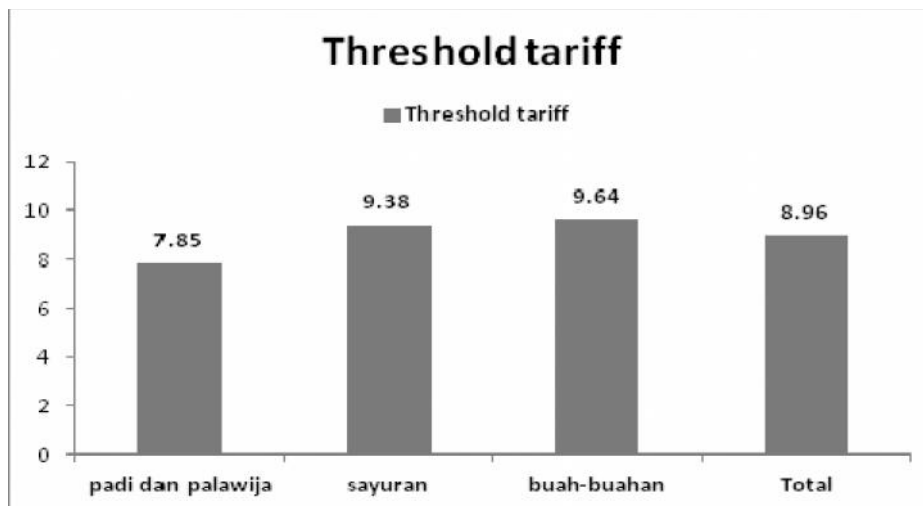
Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Gambar 2
Kontribusi Tarif dalam Fluktuasi Penjualan Petani

Mengacu pada Gambar 2, terlihat pada tarif memiliki pengaruh signifikan terhadap fluktuasi penjualan produk-produk pertanian. Secara umum, tarif bisa mempengaruhi fluktuasi penjualan di level petani hingga mencapai 54,73 persen. Mengingat penetapan tarif merupakan wewenang pemerintah, pemerintah menjadi aktor yang paling berperan disini dalam hal menentukan seberapa banyak petani bisa melakukan penjualan hasil-hasil buminya. Ini berarti pemerintah tidak bisa gegabah dalam menentukan persoalan tarif dan harus mengacu pada kondisi domestik. Penentuan tarif tidak bisa semata-mata hanya melibatkan komitmen Indonesia dalam perjanjian ekonomi internasional, tapi juga harus melibatkan kesiapan ekonomi domestik. Diagram ini menunjukkan bahwa penentuan tarif yang salah bisa berpengaruh sangat besar pada penjualan produk-produk pertanian domestik. Imbasnya, petani akan merasakan pengurangan pendapatan dan level kesejahteraan.

Buah-buahan merupakan komoditas yang paling rentan terpengaruh oleh tariff (Gambar 2). Pengaruh tarif terhadap penjualan buah-buahan domestik mencapai level 69,04 persen atau jauh mengungguli produk-produk lainnya. Produk padi dan palawija berada di posisi kedua, dimana tarif berkontribusi hingga mencapai 54,98 persen terhadap fluktuasi penjualannya. Posisi ketiga ditempati oleh sayuran, dimana tarif mempengaruhi fluktuasi penjualannya sebesar 44,97 persen.

Berdasarkan hasil estimasi tarif optimal, terlihat bahwa ambang batas tarif yang masih bisa diterima oleh produk-produk pertanian Indonesia berada pada kisaran 7,8-9,6 persen. Ambang batas tarif di sini maksudnya adalah tarif terendah yang bisa diterapkan oleh Pemerintah Indonesia agar produk pertanian domestik tetap kompetitif. Sebagai contoh, tarif minimal yang bisa dibuat untuk produk padi dan palawija adalah sebesar 7,85 persen.



Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Gambar 3
Level Tarif Maksimum Produk Pertanian

Apabila level tarif dibuat lebih rendah dari ambang batas ini, maka produk padi dan palawija di dalam negeri akan tergerus oleh produk-produk impor yang

membanjir masuk, misalnya produk padi dari Thailand dan Vietnam yang dikenal sebagai eksportir beras terbesar pertama dan kedua di dunia. Di sisi lain, jika pemerintah menerapkan tarif yang lebih besar dari level tarif ini (misalnya 9 persen), maka dampaknya akan terasa di dalam negeri dalam wujud produk-produk domestik yang kompetitif. Selanjutnya, kesejahteraan petani padi dan palawija di dalam negeri juga secara langsung akan meningkat.

Gambar 3, terlihat bahwa secara umum produk pertanian Indonesia hanya mampu bersaing dengan produk-produk impor apabila pemerintah memasang tarif umum sebesar 8,96 persen. Tarif padi dan palawija terlihat mampu bersaing hingga ke level tarif 7,85 persen. Jika angka ini dihubungkan dengan tarif produk pertanian Indonesia dengan Negara ASEAN (tabel 2) yang sudah menerapkan sebesar 7,9 persen untuk produk pertanian maka diharapkan Indonesia tidak menerapkan kebijakan penurunan tarif produk pertanian di masa mendatang. Meski demikian, produk-produk yang paling rentan terhadap persaingan asing adalah produk sayuran dan buah-buahan. Produk sayuran domestik hanya kompetitif jika pemerintah memasang tarif sebesar 9,38 persen. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga berlaku untuk produk buah-buahan, dimana pemerintah harus memasang tarif 9,64 persen untuk melindungi produsen buah-buahan di dalam negeri.

Produk-produk pertanian Indonesia belum cukup kompetitif untuk bisa diajukan di dalam perundingan kerjasama internasional. Oleh karena itu, tampaknya belum cukup waktu bagi Indonesia untuk membuat usulan tentang penurunan tarif produk pertanian. Jauh lebih baik jika Indonesia mempersiapkan diri agar produk-produk pertanian bisa lebih kompetitif di masa depan. Hal ini akan lebih menyuarakan kepentingan produsen-produsen pertanian di dalam negeri yang belum siap menerima persaingan dari negara lain. Indonesia tidak perlu memaksakan diri untuk meliberalisasi sektor pertaniannya jika memang secara riil belum siap.

PENUTUP

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas dapat kita simpulkan bahwa besaran tarif berpengaruh pada nilai penjualan dari petani. Jika pemerintah menaikkan level tarif, maka secara langsung penjualan produk pertanian juga akan meningkat. Dari hasil estimasi model diperoleh bahwa koefisien estimasi sebesar 1,62 juta. Hal ini berarti jika pemerintah menaikkan tarif sebesar 1 persen, maka secara langsung akan menikmati peningkatan pendapatan sebesar Rp 1,62 juta/hektar. Sebaliknya jika pemerintah hendak menurunkan tarif, petani juga akan langsung merasakan dampak berupa penurunan penjualan. Jika pemerintah menurunkan tarif sebesar 1 persen, maka petani akan kehilangan pendapatan sebesar Rp 1,62 juta/hektar. Untuk tarif optimal, terlihat bahwa ambang batas tarif yang masih bisa diterima oleh produk-produk pertanian Indonesia berada pada kisaran 7,8-9,6 persen. Ambang batas tarif ditujukan untuk menentukan di level tarif mana pertanian kita dapat tetap kompetitif. Sebagai contoh, tarif minimal yang bisa dibuat untuk produk padi dan palawija adalah sebesar 7,85 persen. Selain itu kontribusi tarif juga memiliki pengaruh signifikan terhadap fluktuasi penjualan produk-produk pertanian. Secara umum, tarif bisa mempengaruhi fluktuasi penjualan di level petani hingga mencapai 29,98 persen. Dari diagram tersebut, terlihat bahwa buah-buahan merupakan komoditas yang paling rentan terpengaruh oleh tarif. Pengaruh tarif terhadap penjualan buah-buahan domestik mencapai level 37,82 persen atau

jauh mengungguli produk-produk lainnya. Produk padi dan palawija berada di posisi kedua, dimana tarif berkontribusi hingga mencapai 30,12 persen terhadap fluktuasi penjualannya. Posisi ketiga ditempati oleh sayuran, dimana tarif mempengaruhi fluktuasi penjualannya sebesar 24,63 persen. Beberapa hal yang kami rekomendasikan adalah *pertama*, Mengupayakan secara sistematis dan struktural untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia terutama produktivitas dan kualitas. *Kedua*, mempersiapkan dengan matang rencana atau tahapan agar pertanian kita dapat menjadi produk yang kompetitif di masa mendatang, sehingga kita tidak terlalu bergantung pada produk impor. *Ketiga*, menambahkan *capacity building* dalam beberapa aspek. *Capacity building* yang perlu diangkat adalah: *Capacity building* untuk melampaui hambatan non tarif yang disyaratkan oleh Negara-Negara Mitra Indonesia; *Capacity building* sebaiknya menyentuh pembangunan kapasitas institusi, pembangunan kapasitas SDM, dan pembangunan kapasitas infrastruktur; Indonesia perlu menginventaris hambatan non tarif negara Mitra dan mengidentifikasi *capacity building* yang cocok untuk produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2015. *Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2000-2014 (Persen)*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Baggs, J., and Brander, J. A. 2006. Trade Liberalization, Profitability, and Financial Leverage. *Journal of International Business Studies* 37(2): 196-211.
- Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian. 2014. Statistik Ekspor Impor Komoditas Pertanian 2001-2013. *Jurnal Statistik Ekspor Impor Komoditas Pertanian* 3(1): 1-39.
- Gujarati, D. N. 1995. *Basic Econometrics*. McGraw-Hill. New York
- Harrison, Ann / Hanson, Gordon (1999): Who gains from trade reform? Some remaining puzzles, in: *Journal of Development Economics* 59(2): 125-154.
- Izadmehr, et.al. 2014. Research on The Effects of WTO Accession on Profitability of Selected Industries in Tehran's Stock Exchange. *Indian Journal of Fundamental and Applied Life Science*.
- Laporan Tahunan Bank Indonesia. 2015. Departemen Komunikasi. Diambil dari www.bi.go.id. Diakses tanggal 01 Januari 2015.
- Pudjiastuti, Agnes Quartina. 2014. Perubahan Neraca Perdagangan Indonesia Sebagai Akibat Penghapusan Tarif Impor Gula. *Agriekonomika* 3(2): 110-120.
- Reinars, S dan Sulaiman. 2015. Ekonomi Makro. <http://kompas.com>. Diakses tanggal 30 April. 2015